

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAPAK *ONLINE*
WAJIB BERIZIN
(Studi Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang
Perdagangan Melalui Sistem Elektronik)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (S.H)**

Oleh :

SITI NUR AZIZAH

NPM: 1621030240

Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)



**FAKULTAS SYAR'IAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/ 2021 M**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAPAK *ONLINE*
WAJIB BERIZIN
(Studi Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang
Perdagangan Melalui Sistem Elektronik)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

**SITI NUR AZIZAH
NPM: 1621030240**

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Pembimbing I : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag.

Pembimbing II : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H / 2021 M**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Nur Azizah

NPM : 1621030240

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syaria'h

Fakultas : Syaria'h

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Analisis Hukum Islam Terhadap Pelapak *Online* Wajib Berizin (Studi Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik)**" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 29 Maret 2021



Siti Nur Azizah
NPM. 1621030240



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H.Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

HALAMAN PERSETUJUAN

Tim pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara:

Nama : Siti Nur Azizah

Npm : 1621030240

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**Judul : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAPAK
ONLINE WAJIB BERIZIN (Studi Pasal 15 Peraturan
Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan
Melalui Sistem Elektronik)**

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang
Munqosyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag
NIP.197111061998032005**

**H. Rohmat, S.Ag., M.H.I
NIP.197409202003121003**

**Mengetahui
Ketua Jurusan Muamalah**

**Khoiruddin, M.S.I
NIP. 197807252009121002**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H.Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelapak Online Wajib Berizin (Studi Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik)” disusun oleh SITI NUR AZIZAH, NPM : 1621030240, Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah), Telah di Ujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan pada Hari/Tanggal : Kamis, 08 April 2021.

Tim Penguji

Ketua : Agustina Nurhayati, S.Ag. M.H.

(.....)

Sekretaris : Muslim, S.H.I., M.H.I.

(.....)

Penguji I : Dr. H. Khoirul Abror, M.H.

(.....)

Penguji I : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag.

(.....)

Penguji II : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.

(.....)

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**



**Dr. H. Khairuddin, M.H.
NIP. 196210221993031002**

ABSTRAK

Dalam era globalisasi saat ini, banyak bermunculan model-model bisnis dengan menggunakan kecanggihan teknologi modern. Semakin canggihnya teknologi informasi ternyata cukup berpengaruh terhadap gaya belanja masyarakat, salah satunya adalah belanja via toko *online*. Jual beli *online* memiliki dampak positif karena dianggap praktis, cepat dan mudah. Namun kemudahan dalam bertransaksi tersebut justru rawan menimbulkan banyak risiko dan kerugian yang ditanggung pembeli khususnya, karena pembeli tidak cermat dalam memilih pelapak *online* yang sudah memiliki surat izin usaha perdagangan melalui sistem elektronik. Permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana prinsip dasar dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik terhadap pelapak *online*? dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, pelapak *online* wajib berizin? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prinsip dasar Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, terkait tentang kewajiban izin bagi pelapak *online* dan untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap pelapak *online* wajib berizin dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, membaca buku-buku, literatur dan menelaah dari berbagai macam teori yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti. Dengan menggunakan sumber data bahan hukum primer Al-Qur'an, Hadits, dan Peraturan Perundang-undangan.

Hasil dari penelitian terhadap kewajiban memiliki izin usaha perdagangan melalui sistem elektronik bagi pelapak *online* yang diatur dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), adalah terdapat beberapa prinsip dasar dalam Pasal 15, yaitu: (1) pelaku usaha wajib memiliki izin usaha dalam melakukan kegiatan usaha perdagangan melalui sistem elektronik. (2) memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam memperoleh surat izin usaha perdagangan melalui sistem elektronik (SIUPMSE). Analisis hukum Islam terhadap penetapan peraturan tentang kewajiban memiliki izin usaha perdagangan melalui sistem elektronik bagi pelapak *online* secara hukum Islam sudah sesuai dengan ketentuan *syari'ah*. Hal tersebut dikarenakan pelapak *online* wajib memiliki izin usaha perdagangan elektronik, sebenarnya ialah untuk melindungi hak-hak konsumen, meminimalisir kemudharatan dari penipuan yang akan terjadi pada jual beli *online* dan sudah sesuai dengan konsep *maṣlahah mursalah* yaitu memberikan kemanfaatan dan mencegah kemudharatan, kemaslahatan yang dikehendaki adalah kemaslahatan untuk semua pihak, baik pelaku usaha maupun konsumen.

MOTTO

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan
kemaslahatan.”



PERSEMBAHAN


Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. dan kita sebagai pengikutnya mendapatkan *syafa'at* kelak di *yaumul qiyamah*, *āmin*. Dengan bangga dan kerendahan hati yang sangat dalam, penulis mempersembahkan karya kecil ini untuk orang-orang yang tersayang:

1. Bapak dan Ibuku tercinta, Bapak Sarifin dan Ibu Kokom Komariah yang tak henti-hentinya mendoakan, mendukung baik moral maupun materil. dan senantiasa selalu memberikan cinta, kasih sayang, pengorbanan, dukungan, motivasi serta memberikan doanya disetiap sujudnya yang selalu membangkitkan dan menguatkan dalam menuntut ilmu
2. Yang saya sayangi dan banggakan Adik saya Rahma Durrotun Nafisa yang selalu mendukung dan mendoakan kebaikan-kebaikan selama menuntut ilmu.
3. Yang saya sayangi, kaka tercinta Nuryadi, S.Pd.I. yang selalu mendukung dan mendoakan dalam menyelesaikan skripsi ini
4. Keluarga besar Bapak dan ibu yang telah memotivasi saya selama menuntut ilmu.
5. Almamaterku tercinta, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah mendiidk dan mendewasakanku dalam berfikir maupun bertindak.

RIWAYAT HIDUP

Siti Nur Azizah dilahirkan di Bandung, pada tanggal 08 Mei 1998, merupakan putri pertama dari 2 bersuadara, dari pasangan bapak Sarifin dan Ibu Kokom Komariah. Siti Nur Azizah memiliki 1 saudara kandung yang bernama Rahma Durrotun Nafisa.

Riwayat pendidikan dimulai dari Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 6 Bandar Lampung dan selesai Tahun 2010, Madrasah Tsanawiyah Al-Hikmah Bandar Lampung selesai tahun 2013, Madrasah Aliyah Al-Hikmah Bandar Lampung selesai tahun 2016. Kemudian pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan ke tingkat pendidikan tinggi UIN Raden Intan Lampung pada Fakultas Syari'ah Program Studi Muamalah



Bandar Lampung, 20 April 2021

Penulis,

Siti Nur Azizah

Npm. 1621030240

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, karunia serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat akademik untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syaria'ah (*Mu'amalah*) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, serta guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

Penulis menghaturkan banyak mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah ikut serta berperan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh Mukri, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberi kesempatan untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Bapak Dr. H. Khairuddin Tahmid, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah Uin Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I selaku ketua Jurusan Muamalah. Serta Ibu Juhrotul Khulwah, M.S.I selaku Sekertaris Jurusan Muamalah UIN Raden Intan Lampung.
4. Ibu Dr. Hj.Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing I dan Bapak H. Rohmat, S.Ag., M.H.I. selaku pembimbing II yang selalu memberikan dukungan dan senantiasa membimbing penulis hingga skripsi ini terselesaikan.

5. Tim Penguji : Ibu Agustina Nurhayati, S.Ag. M.H. sebagai Ketua, Bapak Muslim, S.H.I., M.H.I. sebagai Sekertaris, Bapak Dr. H. Khoirul Abror, M.H. sebagai Penguji I, Ibu Dr. Hj.Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag. Sebagai Penguji II, Bapak H. Rohmat, S.Ag., M.H.I. sebagai Penguji III.
6. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dan juga seluruh Staf Kasubbag yang telah membantu selama masa perkululiahan.
7. Para pegawai perpustakaan pusat UIN Raden Intan Lampung maupun perpustakaan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan.
8. Teman-teman seperjuangan dalam menuntut ilmu jurusan Muamalah angkatan 2016, khususnya muamalah E.
9. Sahabat terbaikku Darrotin Risky Fitriani, Indah Susilowati, Saras Salsabila, Puji Pinasti, Amega Dian Permatha, Misi Suci Yanti, Andela, Lia Kartika, Resa Pelia, Pitriyana yang selalu memberikan doa, dukungan, saran dan nasehatnya. Dan terimakasih sudah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Almamaterku tercinta, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 20 April 2021

Siti Nur Azizah
NPM. 1621030240

DAFTAR ISI

| | |
|------------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRAK | ii |
| SURAT PERNYATAAN | iii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | iv |
| HALAMAN PENGESAHAN | v |
| MOTTO | vi |
| PERSEMBAHAN | vii |
| RIWAYAT HIDUP | viii |
| KATA PENGANTAR | ix |
| DAFTAR ISI | xii |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|---------------------------------|----|
| A. Penegasan Judul | 1 |
| B. Alasan Memilih Judul | 3 |
| C. Latar Belakang Masalah | 3 |
| D. Fokus Penelitian | 7 |
| E. Rumusan Masalah | 8 |
| F. Tujuan Penelitian | 8 |
| G. Signifikasi Penelitian | 8 |
| H. Metode Penelitian | 9 |
| I. Kajian Pustaka | 12 |

BAB II KAJIAN TEORI

| | |
|--|----|
| A. Teori Jual Beli | 17 |
| 1. Pengertian Jual Beli | 17 |
| 2. Dasar Hukum Jual Beli | 19 |
| 3. Rukun dan Syarat Jual Beli | 21 |
| 4. Macam-macam Jual Beli | 29 |
| 5. Hukum (Ketetapan) dan Sifat Jual Beli | 30 |
| 6. Manfaat dan Hikmah Jual Beli | 32 |
| B. Teori Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam | 33 |
| 1. Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam | 33 |
| 2. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen | 40 |
| 3. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen | 43 |
| 4. Hak dan Kewajiban Konsumen Serta Pelaku Usaha | 46 |
| C. Teori <i>Maṣlahah Mursalah</i> | 49 |
| 1. Pengertian <i>Maṣlahah Mursalah</i> | 49 |
| 2. Syarat <i>Maṣlahah Mursalah</i> | 52 |

BAB III PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 80 TAHUN 2019 TENTANG PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

| | |
|--|----|
| A. Dasar Pemikiran Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik | 55 |
| B. Ruang Lingkup Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik | 58 |

| | |
|--|----|
| C. Perizinan Bagi Pelapak <i>Online</i> Dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik | 61 |
| BAB IV ANALISIS PENELITIAN | |
| A. Perizinan Pelapak <i>Online</i> Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik..... | 67 |
| B. Hukum Islam Terhadap Perizinan Pelapak <i>Online</i> Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik..... | 69 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Kesimpulan..... | 74 |
| B. Rekomendasi | 75 |

DAFTAR RUJUKAN
LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penelitian ini berjudul “**Analisis Hukum Islam Terhadap Pelapak Online Wajib Berizin (Studi Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik)**”. Untuk menghindari kesalahpahaman dari judul di atas, maka perlu ditegaskan beberapa istilah penting, yang terdapat pada judul tersebut antara lain:

“**Hukum Islam** adalah seperangkat aturan yang berisi hukum-hukum *syara*’ yang bersifat terperinci, berkaitan dengan perbuatan manusia, yang dipahami dan digali dari sumber-sumber (*Al-Qur’an dan Al-Sunnah*)”.¹

Pelapak Online adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang dapat berupa pelaku usaha dalam Negeri dan pelaku usaha luar Negeri dan melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan melalui sistem elektronik.²

Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik.³

¹ Dahlan Rahman, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Paragonatama Jaya, 2014), 15.

² Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

³ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

**Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang
Perdagangan Melalui Sistem Elektronik berbunyi:⁴**

1. Pelaku usaha wajib memiliki izin usaha dalam melakukan kegiatan usaha perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).
2. Penyelenggara sarana prantara dikecualikan dari kewajiban memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika:
 - a. Bukan merupakan pihak yang mendapatkan manfaat (*beneficiary*) secara langsung dari transaksi, atau
 - b. Tidak terlibat langsung dalam hubungan kontraktual para pihak yang melakukan PMSE
3. Dalam rangka memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengajuan izin usaha dilakukan melalui perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (KBLI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi PPMSE mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang diatur dengan peraturan menteri

Berdasarkan penegasan judul di atas, dapat dipahami maksud dari skripsi ini adalah menganalisis Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, dalam pandangan hukum Islam.

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019, Pasal 15.

B. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa alasan yang memotivasi dipilihnya judul skripsi ini sebagai bahan penelitian, diantaranya sebagai berikut:

1. Alasan Objektif, mengingat semakin menjamurnya pelapak *online* di masyarakat saat ini dan perdagangan melalui sistem elektronik sangat digandrungi. Banyak masyarakat bahkan pelapak *online* yang masih kurang paham bahwa pentingnya memiliki izin bagi pelapak *online* dan semakin banyak pelanggaran dalam jual beli melalui sistem elektronik. Maka lahirlah Peraturan Pemerintah ini, untuk melindungi para konsumen dan pelapak *online*.
2. Alasan Subjektif, dari aspek yang telah diteliti mengenai permasalahan tersebut ditinjau dari bahasa serta tersedianya literatur yang menunjang maka sangat mungkin dilakukan penelitian, skripsi ini sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di bidang Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang Masalah

Salah satu bentuk *mu'amalah* yang tata cara pelaksanaannya diatur dalam Islam adalah masalah jual beli. Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai yang sama sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lain menerima uang sesuai dengan perjanjian atau keterangan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati.⁵ Firman Allah Swt dalam Q.S Al-Baqarah (2) 275:

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 68.

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة: ٢٧٥)

Artinya: "...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."⁶

Dalam era globalisasi saat ini, banyak bermunculan model-model bisnis dengan menggunakan kecanggihan teknologi modern. Hal ini ditandai dengan berkembangnya media elektronik yang mempengaruhi aspek kehidupan manusia, khususnya dalam bertransaksi jual beli melalui media *online*, yakni internet. Peran internet saat ini bukan hanya untuk aktivitas komunikasi, namun juga sebagai alat untuk pencarian informasi. Alat-alat komunikasi seperti komputer, laptop, *smartphone* sangat memudahkan masyarakat untuk melakukan koneksi dengan internet untuk melakukan transaksi jual beli.⁷

Ada beberapa keuntungan menggunakan internet yang salah satu keuntungannya adalah dapat digunakan sebagai media perdagangan. Saat ini telah banyak pelapak *online* di tengah-tengah masyarakat. di Indonesia, istilah *e-commerce* lebih sering disebut dengan *online shop*, atau berbelanja melalui media internet. *Online shop* dalam perkembangannya tidak lagi hanya melibatkan perusahaan besar, namun juga telah memungkinkan industri rumah untuk menjalankan sebuah toko *online*. Hal ini merupakan hasil perkembangan teknologi *smartphone* yang memungkinkan seseorang mengakses internet dari ponselnya. Kondisi tersebut melahirkan *online shop* yang memanfaatkan situs jejaring sosial seperti BBM, *whatsapp*, *facebook*, *instagram*, dan lain sebagainya untuk media iklan dan mempromosikan dagangannya. Namun, karena setiap

⁶ Departemen Agama R.I, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Toha Putra, Semarang, 1989, 69.

⁷ Wulandari, Friska Muthi. Desember 2015. "Jual Beli Online yang Aman dan Syar'i". *Jurnal Az-Zarqa'*. Vol.7, No.02, (November 2016), 85.

orang bisa menjadi pedagang *online shop* akhirnya membuat situasi pasar *online* menjadi penuh persaingan dan rawan penipuan.⁸

Proses transaksi secara *online* pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan proses transaksi jual beli secara langsung. Transaksi secara *online* menggunakan kontrak jual beli yang disebut kontrak elektronik. Kontrak elektronik ini adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik.⁹ Dengan demikian suatu transaksi *online* harus memenuhi syarat sahnyanya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 *Burgerlijk Wetboek*, yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, adanya objek, dan adanya klausa yang halal.¹⁰

Semakin canggihnya teknologi informasi ternyata cukup berpengaruh terhadap gaya belanja masyarakat, salah satunya adalah belanja via toko *online*. Jual beli atau bisnis melalui *online* memiliki dampak positif karena dianggap praktis, cepat, dan mudah. Mudahnya dalam bertransaksi tersebut justru rawan menimbulkan banyak risiko dan kerugian yang ditanggung pembeli khususnya. Risiko dari jual beli *online* yang sering terjadi yakni maraknya penipuan. Beberapa penyebabnya adalah tidak bertemunya penjual dan pembeli. Setelah uang ditransfer barang tak kunjung datang. Selain itu, barang tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah dipaparkan dan pada akhirnya menimbulkan ketidakpuasan pelanggan.

⁸ Hismendi. Februari 2016. "E-Commerce: Model Interaksi Jual Beli". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol.15. No.01, <https://www.researchgate.net/publication/316452392>. 20 Februari 2020.

⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun ..., Pasal 1 ayat 4.

¹⁰ R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2016), 339.

Salah satu peraturan yang mengatur tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019. Penyusunan Peraturan Pemerintah Perdagangan Melalui Sistem Elektronik ini diamanatkan dari Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Sejumlah pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yaitu aspek perlindungan bagi konsumen. Pengaturan ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi niaga elektronik.

Untuk meminimalisir terjadinya risiko yang sering terjadi pada transaksi jual beli *online* yakni maraknya penipuan, maka diwajibkan bagi pelapak *online* untuk memiliki surat izin usaha perdagangan melalui sistem elektronik (SIUPMSE), yang diatur dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019. Yang berbunyi:

1. Pelaku usaha wajib memiliki izin usaha dalam melakukan kegiatan usaha perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).
2. Penyelenggara sarana prantara dikecualikan dari kewajiban memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika:
 - a. Bukan merupakan pihak yang mendapatkan manfaat (*baneficiary*) secara langsung dari transaksi, atau.
 - b. Tidak terlibat langsung dalam hubungan kontraktual para pihak yang melakukan PMSE.
3. Dalam rangka memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengajuan izin usaha

dilakukan melalui perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (KBLI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undnagan.

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi PPMSE mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang diatur dengan peraturan menteri.¹¹

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka terdapat permasalahan tentang perizinan bagi pelapak *online* yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pasal 15 Nomor 80 tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronok (PMSE), untuk itu perlu kiranya dilakukan penelitian yang mengkaji masalah izin bagi pelapak *online* yang dianalisis dalam pandangan hukum Islam. Dari masalah tersebut maka sangat menarik untuk diteliti dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelapak *Online* Wajib Berizin (Studi Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik)”.

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah Pasal 15 dalam Peratutan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Terhadap pelapak online wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (SIUPMSE) dalam pandangan Hukum Islam.

¹¹ Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019, Pasal 15.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana prinsip dasar dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik terhadap pelapak *online*?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, pelapak *online* wajib berizin?

F. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa permasalahan diatas sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prinsip dasar Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik terkait tentang kewajiban izin bagi pelapak *online*.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap pelapak *online* wajib berizin dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

G. Signifikasi Penelitian

Adapun signifikasi penelitian dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan sangat bermanfaat bagi seluruh masyarakat agar mengetahui konsep pelaksanaan Pasal 15 pada

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

2. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian itu dilaksanakan.¹² Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif teoritis, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹³ Adapun pendekatan penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁴ Sehingga penelitian ini menggunakan seperangkat metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library Reaserch*), jenis penelitian ini dapat didefinisikan sebagai suatu penelitian yang diarahkan dan difokuskan untuk menelaah dan membahas bahan-bahan pustaka baik berupa buku-buku, jurnal maupun bahan pustaka lainnya

¹² Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2016), 21.

¹³ Soerjono Soekanto, Sri Mahmudji, *Penelitian Normatik, Suatu Penelitian Singkat*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006), 15.

¹⁴ *Ibid.*

yang relevan dengan kajian yang dibahas, atau dapat dikatakan sebagai penelitian yang mengkaji atau menggunakan buku-buku atau bahan pustaka sebagai sumber datanya.¹⁵

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data,¹⁶ di dalam pasal 15 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019. Deskriptif yang dimaksud yaitu untuk mendapatkan saran-saran mengenai sesuatu yang dilakukan dalam mengatasi masalah tersebut.

2. Sumber Data

Sumber data adalah sumber dimana data penelitian ini dapat diperoleh.¹⁷ Adapun data ini termasuk data sekunder, yaitu terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, bersumber pada Al-Qur'an, Hadits dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019.
- b. Bahan hukum sekunder, bersumber dari kitab-kitab fiqih, buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan masalah ini.
- c. Bahan buku Tersier, bersumber pada Media *Internet* dan Kamus Hukum.

37. ¹⁵ Consuelo G Sevilla dkk, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta, UI Press, 1993),

44 ¹⁶ Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Akarsa, 2012),

¹⁷ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membaca, menelaah, dan mengutip sumber-sumber bacaan yang ada di perpustakaan, baik berupa buku, jurnal, majalah, hasil penelitian dan lain-lain, khususnya masalah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. Pengolahan Data

Secara umum teknik pengolahan data setelah data terkumpul dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*Editing*) yaitu memeriksa ulang, kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut terkumpul.
- b. Rekonstruksi data (*Recontructing*) yaitu menyusun ulang secara teratur berurutan, logis sehingga mudah dipahami sesuai dengan permasalahan kemudian ditarik kesimpulan sebagai tahap akhir dalam proses penelitian.

5. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dan diolah secara sistematis, maka selanjutnya diadakan teknik menganalisa data yang dilakukan dengan cara analisa kualitatif, yang berarti upaya sistematis dalam penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat termasuk di dalamnya adalah kaidah dan teknik untuk memuaskan keingintahuan

peneliti pada suatu gejala yuridis dan normatif atau cara untuk menemukan kebenaran dalam memperoleh pengetahuan.

I. Kajian Pustaka

Berdasarkan pada pengetahuan penulis, bahwa saat ini terdapat beberapa karya ilmiah seperti jurnal, artikel, ataupun karya ilmiah lainnya yang membahas tentang perdagangan melalui sistem elektronik (*E-Commerce*) yang terjadi di masyarakat. Oleh sebab itu dalam penulisan skripsi ini melakukan kajian pustaka dengan tujuan untuk menambah literatur sebagai bukti bahwa telah memahami masalah yang sedang atau akan diteliti. Setelah melakukan telaah terhadap beberapa penelitian, ada beberapa sumber yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

1. Penelitian yang berhasil peneliti temukan adalah penelitian dari Disa Nusia Nisrina (2015) mahasiswa jurusan Peradilan Agama, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Online* Dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen”**. Penelitian ini menggunakan tinjauan hukum islam, yang mana pada penelitian ini difokuskan pada tinjauan hukum islam terhadap jual beli *online* dan relevansinya terhadap undang-undang perlindungan konsumen. Tujuan penelitian ini adalah untuk 1) mengkaji tinjauan hukum islam terhadap jual beli *online*, 2) mengkaji hak-hak konsumen dalam hukum islam dan undang-undang perlindungan konsumen (UUPK), 3) mengkaji relevansi jual beli *online* dalam tinjauan hukum Islam terhadap undang-undang perlindungan konsumen (UUPK).

Hasil dari penelitian tentang tinjauan hukum Islam terhadap jual beli *online* dan relevansinya terhadap undang-undang perlindungan konsumen, adalah:

- a. Jual beli online termasuk aspek muamalah yang pada dasarnya mubah (boleh), kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Selain itu, rukun dan syarat jual beli online juga tidak bertentangan dengan rukun dan syarat dalam sistem hukum perikatan Islam. Yang diharamkan dalam transaksi jual beli online, yaitu transaksi yang didalamnya terdapat unsur-unsur haram, seperti riba, gharar (penipuan), bahaya, ketidakjelasan, merugikan hak orang lain, pemaksaan, dan barang atau jasa yang menjadi objek transaksi adalah halal, bukan yang diharamkan seperti khamr, bangkai, babi, narkoba, judi online, dan sebagainya.
- b. Hak-hak konsumen dalam hukum Islam berupa hak khiyar, diantaranya yaitu khiyar majelis, khiyar 'aib, khiyar syarat, khiyar ta'yin, khiyar ar-ru'yah. Sedangkan hak-hak konsumen dalam UUPK, yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa; hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- c. UUPK telah menekankan asas keseimbangan antara pelaku usaha dengan konsumen. Begitu pula dengan hukum Islam. Asas keseimbangan ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara pelaku usaha dan

konsumen. Relevansi jual beli online menurut hukum Islam terhadap UUPK, secara garis besar dapat disimpulkan berdasarkan asas dan tujuan yang terdapat pada UUPK dan hukum Islam, yaitu asas manfaat, keadilan, keamanan, keseimbangan, dan kepastian hukum dan dalam hukum Islam ditambahkan mengenai informasi halal dan haram dan tujuannya, yaitu menghendaki perlindungan terhadap konsumen melalui proses pengadilan jika terdapat pelanggaran hak terhadap konsumen dan berupa hak khiyar dalam hukum Islam sebagai upaya perlindungan terhadap konsumen. Transaksi jual beli online dan UUPK sangat terkait, karena dalam transaksi jual beli online, pelaku usaha dituntut untuk tidak mengabaikan hak-hak konsumen, sehingga tercipta keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen.¹⁸

2. Jurnal yang ditulis oleh Khalamillah Fahmi yang berjudul **“Transaksi E-commerce dalam Tinjauan Hukum Jual Beli Islam”** yang dimana hasil penelitiannya menjelaskan bahwa transaksi jual beli *online (e-commerce)* mirip dengan akad salam yaitu pembayaran di muka dan barang diterima dikemudian hari. Dan bisnis *e-commerce* tidak bertentangan dengan Syariat Islam jika memenuhi rukun dan syarat-syarat jual beli yang terdapat pada system perjanjian (akad) yang sah dalam hukum Islam. di samping itu bisnis *e-commerce* dapat memenuhi rukun dan syarat jual-beli dalam perikatan hukum Islam, hal ini dapat dilihat dan dianalisis pada pihak yang bertransaksi atau pelaku (penjual dan pembeli), obyek yang

¹⁸ Disa Nusia Nisrina, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Online* dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen,” (Skripsi Pada Program Strata Satu Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar 2015).

ditransaksikan, wujud pernyataan kehendak padasaat terjadi transaksi (ijab qabul) dan sighat (pernyataan kerelaan) yang terdapat pada e-commerce berdasarkan ke empat rukun yang ditetapkan dalam perikatan hukum Islam.¹⁹

3. Dalam skripsi yang ditulis oleh Muhammad Khadafi (2016) mahasiswa jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce (Studi Kasus E-Commerce Melalui Sosial Media Instagram).”** Penelitian dalam skripsi ini membahas tentang perlindungan hukum yang didapatkan oleh konsumen dalam melakukan sebuah transaksi di media elektronik. Hasil penelitian ini adalah bahwa dalam sengketa antara konsumen dan pelaku usaha selama ini peraturan yang digunakan untuk melindungi hak-hak konsumen adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen , namun undang-undang ini tidak secara khusus mengatur mengenai hak-hak konsumen dalam *e-commerce*. Dengan kata lain, konsumen sulit menggugat pelaku usaha *e-commerce* dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen karena pelaku usaha *e-commerce* sangat sulit dijangkau.²⁰

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat perbedaan baik pembahasan, kesimpulan, maupun pemahaman terhadap penelitian yang penulis lakukan.

¹⁹ Fahmdi Khalamillah, “Online Sale And Purcase Transaction (E-Commerce) In The Islamic Law Persepective”. *Jurnal MPRA*, (Juli 2019).

²⁰ Muhammad Khadafi, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce (Studikusus E-Commerce Melalui Sosial Media Instagram),” (Skripsi Pada Program Strata Satu Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta 2016).

Objek kajian di sini adalah bagaimana pelapak online wajib berizin dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang PMSE Pelapak *Online* Wajib Berizin.



BAB II KAJIAN TEORI

A. Teori Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah *fiqh* disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti dan menukarkan sesuatu dengan yang lain.²¹ Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus yaitu menjual dan membeli.²² Kedua kata itu dalam Bahasa Arab sama dengan *al-bai'* dan *al-shira'*.²³ Definisi *al-bai'* adalah mengambil sesuatu dan memberi terhadap sesuatu.²⁴

Menurut bahasa (*etimologi*), jual beli berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain, kata lain dari *al-bai'* (jual beli) adalah *al-tijarah* yang berarti perdagangan.²⁵ Hal ini sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S *Fatir* ayat 29 yang berbunyi:

...يَرْجُونَ تِجْرَةً لَّنْ تَبُورَ (فاطر: ٢٩)

Artinya: "...Mereka mengharapkan *tijarah* (perdagangan) yang tidak akan rugi".²⁶

Secara terminologi, jual beli merupakan bentuk pemindahan hak milik barang atas aset kepada orang lain.²⁷ Terdapat beberapa pendapat

²¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 111.

²² Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), 21.

²³ Dede Nurohman, *Memahami Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 62.

²⁴ Iftahul Khairi, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 1-2.

²⁵ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), 103.

²⁶ Departemen Agama R.I, *Al-Quran dan Terjemahannya . . .*, 437.

mengenai pengertian jual beli, menurut Hanafiah pengertian jual beli (*al-bay*) secara definitif yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.²⁸

Tukar menukar tersebut dilakukan dengan ijab dan kabul atau saling memberi.²⁹ Bangkai, minuman keras dan darah, tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjual belikan karena benda-benda itu tidak bermanfaat bagi muslim. Apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjual belikan, maka menurut ulama Hanafiah jual belinya tidak sah.³⁰ Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanbaliyah, bahwa jual beli (*al-bai'*) yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.³¹

Allah mensyaratkan jual beli sebagai suatu kemudahan untuk manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda. Adakalanya sesuatu yang kita butuhkan itu ada pada orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan itu seseorang tidak mungkin memberinya tanpa imbalan, untuk itu dilakukan hubungan interaksi dengan sesama manusia. Salah satu caranya adalah dengan jalan melakukan jual beli.³²

²⁷ Dede Nurohman, *Memahami Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. . . , 62.

²⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Prenadamedia, 2012), 101.

²⁹ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*. . . , 21.

³⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*. . . , 112.

³¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*. . . , 101.

³² Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah, Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 64.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, jual beli adalah suatu transaksi pertukaran antara barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan oleh syara' (hukum Islam).³³ Yang dimaksud dengan ketentuan hukum Islam disini adalah, transaksi jual beli yang dilakukan harus memenuhi syarat-syarat dan rukun dalam jual beli, apabila salah satu dari rukun dan syarat jual beli tersebut tidak terpenuhi maka akad jual beli dianggap tidak sah atau batal.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Menurut Imam Musthofa dalam bukunya "*Fiqh Mu'amalah Kontemporer*" menyatakan bahwa "jual beli sebagai bagian dari *mu'amalah* mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dari *Al-Qur'an*, *Al-Sunnah* dan telah menjadi *ijma'* ulama dan kaum muslimin. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar *mu'amalah*, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan saling tolong menolong antar sesama manusia."³⁴

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam *Al-Quran* di antaranya dalam surat al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

³³ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. . . , 104.

³⁴ Imam Musthofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. . . , 3.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
(البقرة: ٢٧٥)

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) *riba* tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan, lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat). Sesungguhnya jual beli itu sama dengan *riba*, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil *riba*). Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil *riba*), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”³⁵

Para ulama sendiri telah sepakat mengenai kebolehan jual beli sebagai perkara yang telah dipraktikkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW hingga masa kini. Banyak *hadits* yang menjelaskan tentang kejadian yang terjadi di zaman Rasulullah tentang perniagaan atau jual beli, seperti dalam *hadits* berikut:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: (عَمَلُ الرَّجُلِ جُلٍّ يَبْدُهُ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ). رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ

Artinya: dari Rifa'ah ibnu Rafi' bahwa Nabi Muhammad SAW, pernah ditanya: apakah profesi yang paling baik? Rasulullah menjawab: “Usaha

³⁵ Departemen Agama R.I, *Al-Quran dan Terjemahannya*. . ., 47.

dengan tangan manusia sendiri dan tiap jual beli yang diberkati” (HR. Al-Barzaar).³⁶

Tidak ada perselisihan tentang hukum dari transaksi jual beli dan Islam telah memperbolehkannya, hanya saja dalam perkembangannya mengalami beberapa bentuk atau model jual beli yang membutuhkan pemikiran baru atau *ijtihad* di kalangan umat Islam. Ulama telah sepakat bahwa jual beli dibolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.³⁷

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli akan sah apabila rukun dan syarat jual beli terpenuhi. Ulama Hanafiyah menegaskan bahwa rukun jual beli hanya satu, yaitu *ijab*. Menurut mereka hal yang paling prinsip dalam jual beli adalah saling rela yang diwujudkan dengan kerelaan untuk saling memberikan barang. Maka jika telah terjadi *ijab*, di situ jual beli telah dianggap berlangsung.³⁸

a. Rukun jual beli

Rukun adalah sesuatu yang menentukan sah (apabila dilakukan) dan tidak sahnya (apabila ditinggalkan) sesuatu pekerjaan dan sesuatu itu termasuk di dalam pekerjaan itu. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi *Syari'ah* terdapat tiga rukun dalam jual beli yaitu:

³⁶ Hadits Riwayat Ibnu Majah dan Al-Hakim dari Rafi'ah bin Rafi, diriwayatkan oleh Al-Bazzar, dan dihukumi Shahih oleh Al-Hakim. Dalam Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Maram, Kitab al-Buyu'*, (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2002), 196.

³⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 75.

³⁸ Imam Musthofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. . . , 25.

- 1) Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli, yang terdiri dari penjual, pembeli dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.
- 2) Objek, objek jual beli terdiri atas benda yang terwujud dan benda yang tidak terwujud, yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun tidak terdaftar.
- 3) Kesepakatan, kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat, ketiganya mempunyai makna hukum yang sama.³⁹

Ulama Hanafiyah menegaskan bahwa rukun dalam jual beli hanya satu yaitu ijab. Menurut mereka hal yang paling prinsip dari jual beli adalah saling rela yang diwujudkan untuk kerelaan saling memberikan barang.⁴⁰ Jumhur ulama menyatakan bahwa di dalam jual beli ada empat rukun yang harus dipenuhi yaitu:

- 1) Adanya orang yang berakad atau *al-muta'qidain* penjual dan pembeli.
- 2) *Sighat* (lafal *ijab* dan *qabul*).
- 3) Adanya barang yang di perjual belikan.
- 4) Adanya nilai tukar pengganti barang.⁴¹

b. Syarat jual beli

Syarat jual beli adalah unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh para pihak sebelum melaksanakan akad jual beli, sehingga akan menentukan sah atau tidaknya akad jual beli yang dilakukan oleh penjual dan

³⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*. . ., 102.

⁴⁰ Imam Musthofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. . ., 25.

⁴¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*. . ., 115.

pembeli. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi agar akad di dalam jual beli dapat dikatakan sah adalah sebagai berikut:

1) Syarat jual beli menurut Subjeknya, bagi orang yang melakukan transaksi jual beli, maka penjual dan pembeli harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a) Berakal, yaitu dapat membedakan dan memilih mana yang terbaik bagi dirinya, jual beli hendaknya dilakukan dalam keadaan sadar dan sehat, oleh karena itu apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang dilakukan tidak sah.⁴²

Sebagaimana firman Allah Swt, dalam Q.S An-Nisa' ayat 5 yang berbunyi:

وَلَا تَوْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (النساء: ٥)

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.”⁴³

b) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan), maksudnya dalam melakukan jual beli salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak dalam tekanan atau paksaan dari pihak lain saat melakukan transaksi jual beli, sehingga transaksi jual beli harus atas kehendak sendiri dan saling *ridho* satu sama lainnya. Oleh sebab itu jual beli yang dilakukan bukan atas kehendak sendiri tidak

⁴² Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. . ., 105.

⁴³ Departemen Agama R.I, *Al-Quran dan Terjemahannya*. . ., 77.

sah.⁴⁴ Hal ini sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-qur'an surah An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء: ٢٩)

Artinya: “hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁴⁵

- c) Tidak Mubadzir/ Tidak Boros, maksudnya adalah para pihak yang melakukan jual beli bukanlah orang yang mubadzir (boros), karena orang yang boros itu suka menghambur-hamburkan uang untuk hal yang tidak penting, maka jual beli yang dilakukan oleh orang yang pemboros adalah tidak sah. Seperti halnya di dalam firman Allah Swt. Qur'an surah Al-Isra' ayat 27 yang berbunyi:

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ
لِرَبِّهِ ۖ كَفُورًا (الإسراء: ٢٧)

⁴⁴ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. . ., 106.

⁴⁵ Departemen Agama R.I, *Al-Quran dan Terjemahannya*. . ., 83.

Artinya: “Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada tuhananya.”⁴⁶

d) *Baligh*, Berarti sampai atau jelas. Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil hukumnya tidak sah, akan tetapi apabila anak itu sudah *mumayyiz* (sudah bisa menentukan baik atau buruk) maka jual belinya diperbolehkan dengan syarat jual beli yang dilakukan hanya untuk barang-barang yang murah saja seperti permen, kerupuk dan kue.⁴⁷

2) Syarat Barang dan Nilai Tukar

Barang yang diperjual-belikan harus memenuhi syarat-syarat yang diharuskan, antara lain:

- a) Barang yang diperjual-belikan itu halal.
- b) Barang itu ada manfaatnya.
- c) Barang itu ada ditempat, atau tidak ada tapi ada ditempat lain.
- d) Barang itu merupakan milik si penjual atau di bawah kekuasaannya.
- e) Barang itu hendaklah diketahui oleh pihak penjual dan pembeli dengan jelas, baik zatnya, bentuknya dan kadarnya, maupun sifatnya.⁴⁸

⁴⁶ *Ibid.*, 284.

⁴⁷ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: Febi UIN-SU Press, 2018), 82.

⁴⁸ *Ibid.*, h. 83.

3) Syarat *ijab* dan *qabul*

Pelaksanaan *ijab* dan *qabul* pada transaksi jual beli ada syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu:

- a) Tidak ada yang memisahkan antara penjual dan pembeli, maksudnya janganlah pembeli hanya diam saja setelah penjual menyatakan *ijab*nya, begitu sebaliknya.
- b) Antara *ijab* dan *qabul* tidak diselingi kata-kata lain.
- c) Harus ada kesesuaian antara *ijab* dan *qabul*.
- d) *Ijab* dan *qabul* harus jelas.
- e) *Ijab* dan *qabul* harus dapat diterima oleh kedua belah pihak.⁴⁹

Pasal 1320 KUHPdata yang menyatakan bahwa perjanjian dapat dikatakan sah apabila memenuhi beberapa syarat yaitu:

- a) Adanya kesepakatan sukarela antara kedua belah pihak yang melakukan akad perjanjian
- b) Kecakapan atau kedewasaan kedua belah pihak yang melakukan akad perjanjian.
- c) Harus mengenai pokok atau adanya objek tertentu atau objeknya harus jelas.
- d) Dasar alasan atau sebab musabab yang diperbolehkan.⁵⁰

Selain syarat-syarat di atas, ada beberapa syarat tambahan yang menentukan keabsahan akad jual beli agar jual beli dapat dikatakan sah menurut hukum Islam yaitu:

⁴⁹ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. . ., 110.

⁵⁰ R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. . ., 339.

- a) Transaksi jual beli dilakukan secara bebas atas kehendak sendiri, tanpa paksaan dari pihak manapun.
- b) Penyerahan objek transaksi jual beli tidak mendatangkan bahaya.
- c) Bebas dari *gharar*.
- d) Bebas dari *riba*'.⁵¹

Ke-empat syarat keabsahan di atas menentukan sah atau tidaknya suatu akad dalam jual beli. Apabila suatu transaksi jual beli telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya akad, namun tidak memenuhi salah satu diantara ke-empat syarat keabsahan tersebut maka jual belinya dianggap tidak sah. Akad semacam ini dinamakan akad fasid di kalangan ulama Hanafiyah, akad fasid adalah akad yang menurut *syara'* sah pokoknya, tetapi tidak sah sifatnya, artinya suatu akad dalam jual beli yang telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya tetapi belum memenuhi syarat keabsahannya.⁵²

Macma-macam jual beli yang dilarang dalam hukum Islam adalah sebagai berikut:

- a) Menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain, yaitu jual beli barang yang telah ditawarkan oleh orang lain dengan menawarkan harga yang lebih tinggi dari tawaran orang tersebut. Jual beli seperti ini dilarang dalam agama Islam karena dapat menimbulkan perselisihan antara pembeli
- b) Menjual barang untuk mengungguli penjualan orang lain

⁵¹ Imam Musthofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. . ., 29.

⁵² *Ibid.*, h.29.

- c) Membeli dengan menaikkan harga barang padahal tidak bermaksud untuk membelinya
- d) Memperjual belikan barang yang haram dan najis
- e) Jual beli *gharar* (yang terdapat unsur penipuan di dalamnya).

Lafaz *gharar* secara etimologi bermakna kekhawatiran atau resiko, dan *gharar* berarti juga menghadapi suatu kecelakaan, kerugian dan atau kebinasaan, dalam konteks bisnis berarti segala jenis jual beli dengan menipu pihak lain. Diantara contoh praktik *gharar* adalah sebagai berikut:

- (1) *Gharar* dalam Kualitas
 - (2) *Gharar* khualitas
 - (3) *Gharar* dalam harga
 - (4) *Gharar* dalam waktu penyerahan
- f) Jual beli dibawah harga pasar, yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara menemui para petani di desa sebelum mereka masuk pasar dengan membeli hasil panen para petani dengan harga semurah-murahnya sebelum para petani tahu harga pasar, kemudia ia jual dengan harga yang jauh lebih tinggi.
 - g) Jual beli ijon, adalah jual beli barang yang belum layak untuk diperjual belikan.⁵³

⁵³ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 146.

4. Macam-macam Jual Beli

Beberapa klasifikasi hukum jual beli yang terkait dengan syarat dan rukun jual beli, yaitu:⁵⁴

a. Jual beli sah dan halal

Apabila syarat dan rukunnya terpenuhi maka hukum jual beli adalah diperbolehkan, jual beli yang diperbolehkan adalah jual beli yang halal. Inilah hukum asal bagi jual beli.

b. Jual beli sah tetapi haram

Apabila jual beli tersebut melanggar syariat. Seperti jual beli pada saat ibadah, hingga melalaikan ibadah, jual beli dengan menghadang barang sebelum sampai pasar, jual beli dengan menimbun barang hingga menimbulkan spekulasi dan lain sebagainya.

c. Jual beli tidak sah dan haram

Apabila memperjual belikan benda yang dilarang oleh *syara'*. Misalnya jual beli tanah sejauh lemparan batu, jual beli buah yang masih dipohon dan belum tampak hasilnya, jual beli binatang dalam kandungan dan lain sebagainya.

d. Jual beli sah dan disunnahkan

Seperti jual beli dengan maksdu menolong untuk meringankan beban orang lain.

e. Jual beli san dan wajib

⁵⁴ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, jus IV, h. 405-406

Seperti menjual barang milik orang yang sudah meninggal untuk membayar hutangnya.

5. Hukum (Ketetapan) dan Sifat Jual Beli

Hukum atau ketetapan yang dimaksud yakni penetapan barang milik pembeli dan penetapan uang milik penjual. Hak penjual dan hak pembeli yang termasuk kedalam akad adalah segala aktivitas yang harus dikerjakan sehingga menghasilkan konsekuensi oleh akad tersebut, seperti menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli, memegang harga (uang), mengembalikan barang yang cacat, *khiyar* dan lain-lain. Pengertian harga dan barang jualan, secara umum barang jualan adalah perkara yang menjadi tentu dengan ditentukan. Sedangkan pengertian harga secara umum adalah perkara yang tidak tentu dengan ditentukan. Definisi tersebut sebenarnya sangat umum sebab sangat bergantung pada bentuk dan barang yang diperjual belikan seperti penetapan uang muka.⁵⁵

Ketetapan barang jualan dan harga, hukum-hukum yang berkaitan dengan barang jualan dan harga antara lain:⁵⁶

- a. Barang jualan disyaratkan haruslah yang bermanfaat, sedangkan harga tidak disyaratkan demikian.
- b. Barang jualan disyaratkan harus ada dalam kepemilikan penjual, sedangkan harga tidak disyaratkan demikian.
- c. Tidak boleh mendahulukan harga pada jual beli pesanan, sebaliknya barang jualan harus didahulukan.

⁵⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* . . . , 86.

⁵⁶ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, juz IV . . . , 405-406

- d. Orang yang bertanggung jawab atas harga adalah pembeli, sedangkan yang bertanggung jawab atas barang jualan adalah penjual.
- e. Menurut ulama Hanafiah, akad tanpa menyebutkan harga adalah rusak akadnya dan akad tanpa menyebutkan barang jualan adalah batal.
- f. Barang jualan rusak sebelum penyerahan adalah batal, sedangkan bila harga rusak sebelum penyerahan, tidak batal.

Hukum atas barang jualan dan harga rusak serta harga yang tidak laku terdiri atas:⁵⁷

a. Kerusakan Barang

Hukum barang yang rusak, baik seluruhnya maupun sebagian, sebelum akad dan setelah akad, terdapat beberapa ketentuan jika barang yang rusak semuanya tetapi belum diterima oleh pembeli:⁵⁸

- 1) Barang jualan yang rusak dengan sendiirnya atau rusak oleh penjual, maka jual beli adalah batal.
- 2) Barang jualan yang rusak oleh pembeli, maka akad tidak batal tetapi pembeli harus membayar.
- 3) Barang jualan yang rusak oleh orang lain, maka jual beli tidaklah batal tetapi pembeli harus *khiyar* antara membeli atau membatalkannya.

b. Kerusakan harga

Harga rusak ditempat akad sebelum barang dipegang:

⁵⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah . . .*, 87.

⁵⁸ *Ibid.* 90.

- 1) Jika harga berupa uang, maka akad tidak batal sebab dapat diganti dengan yang lain.
- 2) Jika harga menggunakan barang yang dapat rusak dan tidak dapat diganti pada waktu itu, maka akadnya batal.

c. Harga tidak berlaku

Jika uang tidak berlaku sebelum diserahkan kepada penjual, maka akadnya batal. Pembeli harus mengembalikan barang kepada penjual atau menggantikannya jika rusak.⁵⁹

Ditinjau dari hukum dan sifat jual beli, jual beli dibagi menjadi dua macam yaitu jual beli yang sah dan jual beli yang tidak sah. Jual beli yang sah adalah jual beli yang memenuhi ketentuan-ketentuan *Syara'*, baik rukunnya maupun syaratnya sedangkan jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat maupun rukunnya sehingga jual beli menjadi tidak sah atau batal.

6. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

Allah mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan dari-Nya untuk hamba-hamba-Nya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan dan lain sebagainya. Kebutuhan seperti ini tidak pernah terputus selama manusia masih hidup. Tak seorangpun dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, karena itu ia dituntut berhubungan dengan manusia lainnya. Dalam hubungan ini tak ada satu hal pun yang lebih sempurna

⁵⁹ *Ibid.* 90.

dari pertukaran, di mana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna bagi orang lain sesuai kebutuhan masing-masing.⁶⁰

Adapun manfaat dan hikmah dalam jual beli yaitu:⁶¹

- a. Antara penjual dan pembeli dapat merasa puas dan berlapang dada dengan jalan suka sama suka.
- b. Dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki harta yang diperoleh dengan cara yang tidak benar.
- c. Dapat memberikan nafkah bagi keluarga dari rezeki yang halal.
- d. Dapat ikut memenuhi kepentingan hidup masyarakat.
- e. Dapat membina ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan bagi jiwa karena memperoleh rezeki yang cukup dan bisa menerima dengan lapang dada terhadap anugrah dari Allah SWT.
- f. Dapat menciptakan hubungan baik dan persaudaraan antara penjual dan pembeli.

B. Teori Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam

1. Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam

Secara Historis, sejarah perlindungan konsumen dalam Islam sudah dimulai sejak Nabi Muhammad SAW belum diangkat menjadi Rasul, beliau membawa barang dagangan Khadijah binti Khuwalid dengan mendapatkan imbalan atau upah.⁶² Sekalipun tidak banyak literatur yang berbicara tentang

⁶⁰ Abdul Azis Dahlan.. (et.al)., *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Cetakan 1, Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 177

⁶¹ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. . ., 122.

⁶² Mahdi Rizqullah Ahmad, *Biografi Rasulullah, Sebuah studi Analisis Berdasarkan Sumber-sumber Autentik*, (Jakarta: Qisthi Press, 2009), 152.

aspek perlindungan konsumen ketika itu, namun prinsip-prinsip perlindungan konsumen dapat ditemukan dari praktik-praktik bisnis yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, kejujuran, keadilan dan integritas Rasulullah SAW tidak diragukan lagi oleh penduduk Makkah, sehingga potensi tersebut meningkatkan reputasi dan kemampuannya dalam berbisnis.⁶³

Setelah Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, konsumen mendapatkan perhatian yang cukup besar dalam ajaran Islam, baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Bisnis yang adil dan jujur menurut Al-Qur'an adalah bisnis yang tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 279:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتِغُوا فَلَئِنَّ رُءُوسَ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (البقرة: ٢٧٩)

Artinya: “Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.”⁶⁴

Sepintas ayat ini memeang berbicara tentang riba, tetapi secara implisit mengandung pesan-pesan perlindungan konsumen. Di akhir ayat disebutkan tidak menganiaya dan tidak dianiaya (tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi). Dalam konteks bisnis, potongan pada akhir ayat tersebut mengandung perintah perlindungan konsumen, bahwa antara

⁶³ Jusmaliani, dkk, *Bisnis berbasis syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 49.

⁶⁴ Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. . ., 69.

pelaku usaha dan konsumen dilarang untuk saling menzalimi atau merugikan satu dengan yang lainnya. Hal ini berkaitan dengan hak-hak konsumen dan juga hak-hak pelaku usaha (produsen). Konsep bisnis dalam Islam harus dilandasi oleh nilai-nilai dan etika yang menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan.⁶⁵

Setelah Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke Madinah, beliau sebagai pemimpin agama dan sekaligus sebagai pemimpin negara, praktik bisnis yang tidak adil dan mengarah pada kezaliman dilarang dan di hapuskan. Seperti penahanan stok (menimbun), spekulasi, kolusi oligarik, pembatalan informasi penting tentang produk, penjualan dengan sumpah palsu, atau informasi menyesatkan.⁶⁶ Praktik-praktik dalam berbisnis yang dilarang oleh Rasulullah ketika beliau memerintah di Madinah antara lain:

- a. *Talaqi Rukban*, adalah mencegat pedagang yang membawa barang dari tempat produksi sebelum sampai kepasar.
- b. Melipat gandakan harga, menurut Imam Ghazali, dilarang melipat gandakan harga dari kebiasaan yang berlaku.
- c. *Bai' al-gharar*, bisnis yang mengandung unsur penipuan karena tidak adanya kepastian.
- d. *Gisyah*, adalah menyembunyikan cacat barang yang dijual, bisa juga dengan mencampurkan produk cacat kedalam produk yang berkualitas baik.

⁶⁵ Zulham, *Hukum perlindungan konsumen*, (Jakarta: kencana, 2013), 41.

⁶⁶ *Ibid.*, 42-43

- e. Bisnis Najasy, adalah praktik berbisnis di mana seseorang berpura-pura sebagai pembeli yang menawar dengan tawaran tinggi yang disertai dengan pujian kualitas secara tidak wajar, dengan tujuan untuk menaikkan harga barang.
- f. Produk haram, adalah memperdagangkan barang-barang yang telah dilarang dan di haramkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah.
- g. *Tathfif*, adalah mengurangi timbangan atau takaran barang yang telah dijual.⁶⁷

Dari praktik-praktik bisnis yang dilarang tersebut dapat ditarik benang merah, bahwa prinsip bisnis yang diajarkan oleh Rasulullah SAW mengandung nilai-nilai perlindungan terhadap hak-hak konsumen dan mengandung kemaslahatan bagi pedagang maupun konsumen. Kaidah *fiqhiyyan* yang berkaitan dengan kemaslahatan adalah:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.”⁶⁸

Pengertian secara istilah dari kaidah tersebut adalah “Tindakan dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemimpin atau penguasa harus sejalan dengan kepentingan umum, bukan untuk golongan atau untuk diri sendiri. Penguasa adalah pengayom dan pengemban kesengsaraan rakyat. Syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam kaidah ini adalah kemaslahatan yang

⁶⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 147.

⁶⁸ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyah* (Jakarta: Al-Maktabah As-Sa'adiyah Putra, t.th), 52.

dimaksud tidak boleh bertentangan dengan *maqasid as-syar'i*, pilihlah masalah yang terbaik diantara masalah yang mungkin tercapai, tutuplah dan hindari kemudharatan yang mungkin terjadi, mafsadat/mudarat yang lebih ringan lebih baik dari pada mafsadat yang berat. Kebijakan pemimpin dalam kaidah ini setidaknya bisa menimbulkan kepastian hukum bagi umatnya, sehingga perselisihan yang lebih besar dari perbedaan pendapat bisa dihindari.⁶⁹

Rukun yang harus terpenuhi dalam kaidah ini adalah:

- a. Adanya pemimpin yang berdaulat, diakui kepemimpinannya, memenuhi syarat-syarat sebagai pemimpin yang baik.
- b. Adanya rakyat atau umat yang dipimpin.
- c. Adanya kemaslahatan yang akan dicapai, atau menghindari kemafsadatan yang lebih besar.
- d. Adanya kebijakan yang berdasarkan ijtihad yang tidak bertentangan dengan *maqasid as-syar'i*.⁷⁰

Kaidah ini berasal dari fatwa imam Asy-Syafi'i:

مَنْزِلَةُ الْإِمَامِ مِنَ الرَّعِيَّةِ مَنْزِلَةُ الْوَلِيِّ مِنَ الْيَتِيمِ

“kedudukan imam terhadap rakyat adalah seperti kedudukan wali terhadap anak yatim.” Menurut beliau, fatwa beliau adalah berasal dari fatwa Umar

⁶⁹ Abdul Mudjib, *Al-Qowa- 'idul Fiqhiyyah*, Cet-II (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), 61-62.

⁷⁰ Jang Fierman, “Kaidah-Kaidah Fiqh Tentang Politik/Siyasah/Kekuasaan” (<https://jangfierman.blogspot.com/2014/kaidah-kaidah-fiqh-tentang.html?m=1>, diakses pada tanggal 20 Januari 2021, pukul 15.00)

bin Khattab yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansyur dari Abu Ahwash dari Abi Ishaq dari Barra' bin Azib.⁷¹

إِنِّي أَنْزَلْتُ نَفْسٍ مِنْ مَالِ اللَّهِ مَنْزِلَةً وَلِيَّ الْيَتِيمِ إِنَّاخْتَجْتُ أَخَذْتُ مِنْهُ
وَإِذَا أَيْسَرْتُ رَدُّهُ وَإِذَا أَيْسَرْتُ رَدُّهُ وَإِذَا اسْتَغْنَيْتُ اسْتَغْفَفْتُ

“Sungguh aku menempatkan diriku terhadap harta Allah seperti kedudukan wali terhadap anak yatim, jika aku membutuhkan, aku mengambil daripadanya, dan apabila ada sisa aku kembalikan. Dan apabila aku tidak membutuhkan, aku menjauhinya (menahan diri padanya).”⁷²

Kaidah diatas merupakan kaidah yang ditegaskan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berasumsi bahwa kedudukan seorang pemimpin dalam sebuah pemerintahan merupakan suatu kedudukan yang sama dengan kedudukan walinya anak yatim.⁷³ Oleh karena itu seorang pemimpin rakyat memiliki hak penuh terhadap rakyatnya, maka seorang pemimpin memiliki kewajiban membawa rakyatnya kepada kedamaian dan dalam memerintah harus menimbulkan kemaslahatan. Pemimpin merupan sebuah keniscayaan dalam sebuah perkumpulan ataupun suatu badan. Karena tanpa seorang pemimpin maka suatu perkumpulan tidak akan berjalan dengan baik. Hal ini juga ditegaskan oleh Nabi dalam salah satu haditsnya yang intinya bahwa tiap-tiap manusia itu memimpin dirinya sendiri dan dimintai pertanggung jawabannya. Begitu juga dengan seorang presiden ataupun khalifah menjadi

⁷¹ Mudjib, *Al-Qowa'idul Fiqhiyyah* Cet-II. . . , 61-62.

⁷² *Ibid.*

⁷³ Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 144.

pemimpin bagi rakyatnya dan akan dimintai pertanggung jawaban dari apa yang dipimpinnya.⁷⁴

Secara umum sesungguhnya kaidah ini sudah termasuk dalam kandungan Hadits Nabi SAW:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ... (رواه البخارى)

“Dari Abdullah bin Umar ra, Rasulullah SAW bersabda: Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang telah dipimpinnya...” (HR. Bukhari: 2232)⁷⁵

Kaidah ini bisa diartikan bahwa keputusan seorang pemimpin suatu pemerintahan haruslah selalu berorientasikan kepada kebaikan masyarakat. Karena seorang pemimpin merupakan orang yang memiliki kekuasaan terhadap yang dipimpinnya.

Salah satu bentuk kekuasaan yang diperoleh oleh seorang penguasa adalah memutuskan suatu perkara atau menentukan sebuah kebijakan. Maka jika kita berpegang kepada kaidah diatas, apa yang akan diputuskan oleh seorang pemimpin atau kebijakan apa yang akan diambil haruslah memiliki orientasi yang baik, yang membawa kemaslahatan kepada yang dipimpinnya. Kalau presiden, keputusan presiden haruslah membawa kemaslahatan bagi rakyatnya.

⁷⁴ *Ibid.*,

⁷⁵ Abu ‘Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Ensiklopedia Hadits: *Shahih al-Bukhari I Terj. Masyhar dan Muhammad Suhadi, Cet-I* (Jakarta: Almahira, 2011), 848

2. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen

Pelaksanaan perekonomian dalam Islam sepenuhnya berdasarkan ajaran yang terkandung dalam Al-Qur'an, sunnah Rasul SAW, dan ajaran yang dilaksanakan para sahabat. Dengan adanya perlindungan hukum maka diharapkan kehidupan masyarakat akan lebih baik, aman, dan terhindar dari tindakan yang merugikan. Terlepas dari hal yang tersebut di atas, yang tidak kalah pentingnya adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Tentu saja hal ini tidak lepas dari adanya kesadaran produsen (pelaku usaha) sehingga kedua belah pihak tidak saling dirugikan.⁷⁶

Allah SWT berfirman dalam Qs. surah al-Maidah ayat 67:

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ ۚ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (المائدة: ٦٧)

Artinya: “Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir”⁷⁷

Ayat ini mengingatkan Rasul agar menyampaikan ajaran agama kepada ahli kitab tanpa menghiraukan ancaman mereka, yang mana Allah berjanji memelihara Rasul dari gangguan dan tipu daya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dengan kata lain Ayat ini berbicara tentang perlindungan yang diberikan Allah kepada mereka yang menyampaikan ajaran agama

⁷⁶ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis: Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syari'ah*, (Yogyakarta: PT Lkis Printing Cemerlang, 2009), 354

⁷⁷ Departemen Agama R.I, *Al-Quran dan Terjemahannya* . . . ,

Allah, untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan.⁷⁸

Islam juga memiliki prinsip dalam hal melindungi kepentingan manusia, sebagaimana sabada Rasulullah yang menyatakan:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدُ بْنُ سِنَانٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Dari Abu Sa’id Sa’du bin Sinan al-Khudri ia berkata: sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Tidak boleh melakukan perbuatan yang memudharatkan dan tidak boleh membalas kemudharatan dengan cara yang salah.” (HR. Ibnu Majah)⁷⁹

Maksud hadits di atas adalah sesama pihak yang berserikat hendaknya saling menjaga hak dan kewajiban masing-masing, sehingga tidak terjadinya kecurangan-kecurangan yang dapat mengakibatkan kerugian sebelah pihak yang melakukan perserikatan tersebut.⁸⁰

Hal paling penting adalah bagaimana sikap pelaku usaha agar memberikan hak-hak konsumen yang seharusnya pantas diperoleh, serta konsumen menyadari apa yang menjadi kewajibannya. Dengan saling menghormati apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing, maka akan terjadilah keseimbangan (*tawazin*) sebagaimana yang di ajarkan dalam ekonomi islam.⁸¹

⁷⁸ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Volume 3*, (Jakarta: Lentera Hati, 2012), 153.

⁷⁹ Abu Abdullah, Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah Jilid III*, (Beirut: Dar al-Fikr) Terj. Abdul Hayyie dan Muhammad Mukhlisin, (Jakarta: Gema Insani, 2016), 375.

⁸⁰ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis: Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah. . .*, 358.

⁸¹ *Ibid.*

Saat ini banyak sekali ushaa-usaha manusia yang berhubungan dengan barang dan jasa. Selain itu tentu sekarang dengan perkembangan ilmu dan teknologi, serta tuntutan masyarakat yang makin meningkat, melahirkan model-model transaksi baru yang membutuhkan penyelesaian dari sisi hukum Islam. Penyelesaian yang di satu sisi tetap Islami dan di sisi lain mampu menyelesaikan masalah kehidupan yang nyata. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan kaidah-kaidah. Sebagaimana kaidah yang menyatakan:

الْأَصْلُ فِي الْعُقُودِ رِضَا الْمَتَّعِقَيْنِ

Artinya: “Dasar dari akad adalah keridhaan kedua belah pihak.”⁸²

Tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau juga merasa tertipu. Bisa terjadi pada waktu akad sudah saling meridhai, tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, asrtinya hilang keridhaannya, maka akad tersebut bisa batal. Contohnya seperti pembeli yang merasa tertipu karena dirugikan oleh penjual karena barangnya terdapat cacat.⁸³ Kaidah lain yang menjelaskan tentang tanggung jawab adalah sebagai berikut:

كُلُّ تَصْرِفٍ جَرَفَسَادًا أَوْ دَفَعَ صَلاَحًا فِيهِ مِنْهُي عَنْهُ

Artinya: “setiap transaksi yang mendatangkan kerusakan atau menolak kebaikan adalah dilarang.”⁸⁴

⁸² H.A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), 129.

⁸³ *Ibid.*, 31.

⁸⁴ Ahmad Sudirman Abbas, *Qawa'id Fiqhiyah*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2004), h. 168.

Pemberlakuan hukum *khiyar* dalam jual beli baik dilakukan penjual atau pembeli adalah untuk menghindari adanya penipuan. Dengan adanya peraturan ini, pihak yang tertipu diperkenankan membatalkan kembali transaksi dan meminta uangnya kembali.⁸⁵

3. Asas dan Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen

Melindungi kepentingan para pihak di dalam lalu lintas perdagangan atau berbisnis, hukum Islam telah menetapkan beberapa asas yang dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan transaksi kegiatan bisnis, yaitu *at-tauhid*, *istiklaf*, *al-ihsan*, *al-amanah*, *ash-shiddiq*, *al-adl*, *al-khiyar*, *at-ta'awun*, keamanan, keselamatan dan *at-taradhin*.

Asas *tauhid* (mengesakan Allah SWT) dari seluruh kegiatan bisnis di dalam hukum Islam ditempatkan pada asas tertinggi. Kemudian dari asas ini lahir asas *istiklaf*, yang menyatakan bahwa apa yang dimiliki oleh manusia hakikatnya adalah titipan dari Allah SWT, manusia hanyalah sebagai pemegang amanah yang diberikan kepadanya.⁸⁶ Dari asas *tauhid* juga lahir asas *al-ihsan*, yaitu melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain tanpa adanya kewajiban tertentu yang mengharuskannya untuk melaksanakan perbuatan tersebut. Dari ketiga asas tersebut melahirkan asas *al-amanah*, *ash-shiddiq*, *al-adl*, *al-khiyar*, *at-ta'awu*, keamanan, keselamatan, dan *at-taradhin*. Menurut asas *al-amanah* setiap pelaku usaha adalah pengemban amanah untuk masa depan dunia dengan segala isinya (*khalifah fi al-ardhi*), oleh karena

⁸⁵ *Ibid.*, 131.

⁸⁶ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insan Press, 1997),

itu apapun yang dilakukannya akan dipertanggung jawabkan dihadapan Allah SWT. *Ash-shiddiq* merupakan perilaku jujur, yang paling utama di dalam berbisnis adalah kejujuran.⁸⁷

Al-adl adalah keadilan, keseimbangan dan kesetaraan yang menggambarkan dimensi horizontal dan berhubungan dengan harmonisasi segala sesuatu di dalam semesta ini. *Al-khiyar* adalah hak untuk memilih dalam transaksi bisnis, hukum Islam menerapkan asas ini untuk menjaga agar tidak ada perselisihan antara pelaku usaha dengan konsumen. *Ta'awun* adalah tolong menolong, kaena tidak ada satupun manusia yang tidak membutuhkan bantuan dari orang lain. Untuk itu, dalam hubungannya dengan transaksi antara konsumen dan pelaku usaha asas ini harus diterapkan dan dijiwai oleh kedua belah pihak.⁸⁸

Asas keamanan dan keselamatan dalam hukum Islam ada lima hal yang wajib dipelihara (*al-dharuriyyat al-khamsah*), yaitu: memelihara agama (*hifd al-din*), memelihara jiwa (*hifdh an-nafs*), memelihara akal (*hifdh al-aql*), memelihara keturunan (*hifdh nasl*), dan memelihara harta (*hifdh al-maal*).⁸⁹

Tinjauan hukum Islam pada perlindungan konsumen merupakan hal yang sangat penting. Islam melihat sebuah perlindungan konsumen bukan sebagai hubungan keperdataan saja, melainkan menyangkut kepentingan publik secara luas, bahkan menyangkut hubungan antara manusia dengan

⁸⁷ Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), 102.

⁸⁸ *Ibid.*, h. 103.

⁸⁹ Nurhalis, *Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam dan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999*, di akses melalui: <http://smedia.neliti.commediapublications43513-ID>, diakases pada taggal 27 des 2020 pukul 13.42.

Allah SWT. dalam konsep hukum Islam perlindungan atas tubuh berkaitan dengan hubungan *vertical* (manusia dengan Allah) dan *horizontal* (sesama manusia). Islam sangat memperhatikan kehati-hatian terhadap konsumsi suatu barang dan jasa, karena memperhatikan kepada aspek-aspek keselamatan konsumen dalam mengonsumsi barang dan jasa. Perlindungan konsumen harus sesuai dengan konsep kemaslahatan, yaitu asas *al-dharuriy* yaitu faktor dasar yang harus ada pada manusia agar terbentuknya kemaslahatan yang hakiki bagi manusia. Asas ini berhubungan erat dengan pelaksanaan kaidah Islam, yaitu:⁹⁰

- a. *Ad-Dhien*, yaitu memelihara kemaslahatan agama
- b. *An-Nafs*, yaitu asas pemeliharaan dan penjagaan jiwa
- c. *An-nasb*, yaitu menjaga dan memelihara kehormatan dan keturunan
- d. *Al-aql*, yaitu menjaga dan memelihara kejernihan akal pikiran
- e. *Al-mal*, yaitu menjaga dan memelihara harta benda

Dari kelima kaidah tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa kepentingan konsumen tidak boleh diabaikan begitu saja, akan tetapi harus diperhatikan agar kepentingan konsumen dapat terlindungi dengan baik. Kemaslahatan yang dikendaki adalah kemaslahatan untuk semua pihak. Baik penyedia jasa maupun konsumen.

4. Hak dan Kewajiban Konsumen serta Pelaku Usaha

Hak *khiyar* ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang

⁹⁰ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 73.

mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Tujuan diadakan *khiyar* oleh *syara'* berfungsi agar kedua orang yang berjual beli dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing lebih jauh, supaya tidak akan terjadi penyesalan di kemudian hari karena merasa tertipu.⁹¹

Khiyar secara bahasa berasal dari kata ikhtiar yang berarti mencari yang baik dari dua urusan yang baik meneruskan akad atau membatalkannya. Sedangkan menurut istilah kalangan ulama fiqh yaitu mencari yang baik dari dua urusan baik berupa meneruskan akad atau membatalkannya.⁹² Sementara itu menurut Pasal 20 Ayat 8 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah *khiyar* adalah hak pilih bagi penjual atau pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan.⁹³

Kesemua bentuk *khiyar* sebagai bagian yang integral dalam sistem muamalah Islam di mana para pihak yang melakukan akad mempunyai hak sesuai dengan kesepakatannya atau diluar kesepakatannya untuk melakukan pembatalan akad yang dibuat. Untuk itu, *khiyar* yaitu hak yang melekat pada setiap transaksi yang boleh berlaku hak *khiyar*. Hak tersebut dipastikan untuk dapat dipergunakan oleh para pihak dalam melakukan transaksi. Kondisi ini dikembalikan kepada konsep hak yaitu sesuatu yang

⁹¹ Abdul Rahman, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), 98.

⁹² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2014), 99.

⁹³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Muamalah*. . . , 10.

melekat padanya yaitu pada pihak yang bertransaksi.⁹⁴ Tujuan dari adanya *khiyar* tersebut adalah untuk mewujudkan kemashlahatan bagi kedua belak pihak sehingga tidak ada yang dirugikan ataupun rasa ketidakrelaan setelah berakhirnya akad. Ada beberapa macam *khiyar*, diantaranya yaitu:

a. *Khiyar Majlis*

Adalah hak untuk memilih melanjutkan atau membatalkan transaksi bisnis selama masih berada dalam satu tempat (majlis) atau toko.

b. *Khiyar Aib*

Adalah hak untuk membatalkan transaksi bisnis apabila objek transaksi cacat sekalipun tidak ada perjanjian sebelumnya.

c. *Khiyar Syarat*

Adalah hak untuk memilih melanjutkan atau membatalkan transaksi bisnis sesuai dengan waktu yang disepakati atau syarat yang telah ditetapkan bersama.

d. *Khiyar Ru'yah*

Yaitu hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlakunya atau batal jual beli yang dilakukan terhadap suatu objek yang belum diketahui ketika akad berlangsung.

e. *Khiyar Ta'yin*

Yaitu suatu *khiyar* dimana para pihak yang melakukan akad sepakat untuk mengakhiri penentuan barang yang dijual sampai batas

⁹⁴ Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)*, (Banda Aceh: Pena, 2010), 60-6.

waktu tertentu, dan hak untuk menentukannya berada pada salah seorang diantara keduanya. *Khiyar* ini biasanya dilakukan oleh pembeli dalam menentukan barang yang beda kualitas dalam jual beli.⁹⁵

Dalam hukum Islam ada enam hak konsumen yang membutuhkan perhatian serius dari pelaku usaha seperti yang dikemukakan oleh Muhammad dan Alimin sebagai berikut:⁹⁶

- a. Hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, adil, dan terhindar dari pemalsuan
- b. Hak untuk mendapatkan keamanan produk dan lingkungan sehat
- c. Hak untuk mendapatkan advokasi dan penyelesaian sengketa
- d. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan keadaan
- e. Hak untuk mendapatkan ganti rugi akibat negative dari suatu produk
- f. Hak untuk memilih dan memperoleh nilai tukar yang wajar

C. Teori *Maṣlaḥah Mursalah*

1. Pengertian *Maṣlaḥah Mursalah*

Kata '*maṣlaḥah*' yang dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan maslahat, berasal dari Bahasa Arab yaitu *maṣlaḥah*. *Maṣlaḥah* ini secara bahasa berarti manfaat, faedah, bagus, baik, kebaikan, guna atau kegunaan.⁹⁷ *Maṣlaḥah mursalah* menurut istilah terdiri dari dua kata, yaitu *maṣlaḥah* dan *mursalah*. Kata *maṣlaḥah* berarti “manfaat”, dan kata *mursalah* berarti “lepas”.

⁹⁵ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Emoat Madzhab Bagian Muamalah II*, (Jakarta: Darul Ulum Press, 2001), 41.

⁹⁶ Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPFF, 2004), 234.

⁹⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet II, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 634.

Maṣlahah mursalah adalah pengertian maslahat secara umum, yaitu yang dapat menarik manfaat dan menolak mudarat, serta yang direalisasikan oleh syari'at Islam dalam bentuk umum. Nash-nash pokok ajaran Islam telah menetapkan kewajiban memelihara kemaslahatan dan memperhatikannya ketika mengatur berbagai aspek kehidupan. Pembuat syara' (Allah swt dan Rasul-Nya) tidak menentukan bentuk-bentuk dan macam-macam maslahat, sehingga maslahat seperti ini disebut dengan *mursalah*, yaitu mutlak tidak terbatas.⁹⁸

Dengan demikian *maṣlahah mursalah* adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalannya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syari'at dan tidak ada *illat* yang keluar dari syara' yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara', yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemadaratan atau untuk menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan *maṣlahah mursalah*. Tujuan utama *maṣlahah mursalah* adalah kemaslahatan, yakni memelihara dari kemadaratan dan menjaga kemanfaatannya.⁹⁹

Dalam mengkaji konsep maslahat, para ulama fiqh terbagi dalam tiga golongan yaitu:¹⁰⁰

⁹⁸ Salma, "Maslahah dalam Persepektif Hukum Islam". *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*. Vol 10, No 2 (2012).

⁹⁹ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 117

¹⁰⁰ Jamal al-Banna, *Manifesto Fiqh 3 Memahami Paradi gma Fiqih Moderat*, penerjemah Hasibullah Satrawi, Zuhairi Misrawi (Indonesia: Erlangga, 2008), 63.

Golongan pertama, kalangan tekstualitas yang hanya melihat masalah sesuai yang tampak dalam *nash*. Mereka hanya ingin dikenal dengan golongan *zahiriyah* yang hanya melihat kemaslahatan dalam penampilan *nash*.

Golongan kedua, mereka yang hanya memahami masalah dari kacamata *nash*. Namun mereka ini dapat memahami penyebab dan sasaran dari kemaslahatan ini. Dengan analogi mereka dapat memastikan keberadaan masalah dalam hal yang di luar *nash*. Mereka melakukan semua ini untuk membedakan antara masalah yang hakiki dengan masalah yang berbau hawa nafsu.

Golongan ketiga, mereka berkeyakinan bahwa masalah apapun bentuknya, merupakan bagian dari masalah yang disebutkan oleh *syariat*. Yaitu dalam rangka terjaminnya keselamatan jiwa, keyakinan agama, keturunan, akal dan harta. Dalam hal ini, tidak harus didukung oleh sumber dalil yang khas. Masalah seperti ini biasanya dikenal dalam fiqh dengan *maṣlaḥah mursalah*.

Maṣlaḥah mursalah biasa ditemukan dengan melalui metode *istislah*, dan ini merupakan dasar (sumber) hukum Islam, menurut istilah para fuqaha, *istislah* adalah hukum (yang ditetapkan) karena tuntutan masalah yang tidak didukung maupun diabaikan oleh dalil khusus, tetapi sesuai dengan *maqashid al-Syari'ah al-Ammali* (tujuan umum hukum Islam). Istislah merupakan jalan yang ditempuh hukum Islam untuk menerapkan kaidah-kaidah dan perintah-perintahnya terhadap berbagai

peristiwa baru yang tidak ada nashnya. Juga menjadi jalan dalam menetapkan aturan yang harus ada dalam kehidupan umat manusia, agar sesuai dengan *maqashid al-Syari'ah al-Ammah*, dalam rangka menarik kemaslahatan, menolak kemafsadatan dan menegakkan kehidupan sempurna mungkin.¹⁰¹

Apabila sebuah maslahat didukung oleh *nash*, seperti menuliskan *al-Qur'an* supaya tidak hilang, mengajar membaca dan menulis, atau terhadap *nash* yang mendukungnya, seperti kewajiban mengajarkan dan menyebarkan ilmu, perintah mengajarkan segala kebaikan yang diperintahkan *syara'* dan larangan mengerjakan segala macam kemungkaran yang dilarang *syara'*, maka *maṣlaḥah* semacam ini disebut *maṣlaḥah mansus* (*maṣlaḥah* yang ada *nashnya*), *maṣlaḥah* jenis ini tidak termasuk *maṣlaḥah mursalah*. Hukum *maṣlaḥah mansus* ditetapkan oleh *nash* bukan oleh metode *istislah*.¹⁰²

2. Syarat *Maṣlaḥah Mursalah*

Untuk menetapkan bahwa suatu *maṣlaḥah mursalah* itu secara sah dapat difungsikan, membutuhkan beberapa persyaratan yang ekstra ketat. Para ulama yang menjadikan *hujjah maṣlaḥah mursalah*, mereka berhati-hati dalam hal itu, sehingga tidak menjadi pintu bagi pembentukan hukum *syariat* menurut hawa nafsu dan keinginan perorangan. Karena itu para

¹⁰¹ Mustafa Ahmad al-Zarqa', *Al-Istislah wa al-Masai ih al-Mursalah fi Syari'ah al-Islamiyyah wa Ushul Fiqh*, diterjemahkan oleh Ade Dede Rohayana, M.Ag. dengan judul *Hukum Islam dan Perubahan Sosial* (Studi Komparatif Delapan Mazhab Fiqh), (Jakarta: Riora Cipta, 2000), 33.

¹⁰² *Ibid.*,

ulama mensyaratkan dalam *maṣlaḥah mursalah* yang dijadikan dasar pembentukan hukum.

Adapun syarat-syarat khusus yang diberikan oleh Imam al-Ghazali agar *maṣlaḥah mursalah* atau *istislah* dapat menjadi dalil dalam istinbat hukum harus memenuhi syarat-syarat, diantaranya:¹⁰³

- a. Kemaslahatan tersebut termasuk dalam tingkatan atau kategori kebutuhan pokok (*daruriyyah*). Artinya, untuk menetapkan suatu *maṣlaḥah* tingkatannya harus diperhatikan, apakah akan menghancurkan atau merusak lima unsur pokok (*al-usul al-khamsah*) tersebut atau tidak
- b. Kemaslahatan tersebut harus bersifat pasti dan tidak boleh disandarkan pada dugaan (*zan*) semata-mata. Artinya, harus diyakini bahwa sesuatu itu benar-benar mengandung kemaslahatan
- c. Kemaslahatan tersebut harus bersifat *universal*, yaitu kemaslahatan yang berlaku secara umum dan untuk kepentingan kolektif, sehingga tidak boleh bersifat individual dan parsial
- d. Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan intensi legalitas hukum Islam

Dikutip oleh Satria Efendi dalam buku *Ushul Fiqh*, menurut Abdul Wahab Khallaf menjelaskan beberapa persyaratan dalam memfungsikan *maṣlaḥah mursalah*, yaitu:¹⁰⁴

- a. Sesuatu yang dianggap maslahat itu haruslah berupa maslahat yang hakiki yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau

¹⁰³ Muhammad Rusfi, "Validasi Maslahah Mursalah Sebagai Sumber Hukum". *Jurnal Al-Adalah*, Vol 12, No. 01, (2014), h.175.

¹⁰⁴ Satria Efendi dan M.Zein, *Ushul Fiqh*. . ., 152.

menolak kemudharatan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya. Misalnya anggapan bahwa hak untuk menjatuhkan talak itu berada di tangan wanita bukan laki-laki adalah maslahat palsu, karena bertentangan dengan ketentuan syariat yang menegaskan bahwa untuk menjatuhkan talak berada ditangan suami

b. Sesuatu yang dianggap maslahat itu hendaknya berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi. Maksudnya agar dapat ditetapkan bahwa dalam pembentukan hukum suatu kejadian dapat mendatangkan keuntungan kepada kebanyakan ummat manusia, atau dapat menolak mudharat mereka dan bukan mendatangkan keuntungan kepada seseorang atau beberapa orang saja diantara mereka. Kalau begitu, maka tidak dapat disyariatkan sebuah hukum, karena ia hanya dapat menetapkan masalah secara khusus kepada penguasa atau kepada kalangan elit saja, tanpa memperhatikan mayoritas ummat dan kemaslahatannya, jadi masalah harus menguntungkan (memberi manfaat) bagi mayoritas ummat manusia

c. Sesuatu yang dianggap maslahat itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam al-Qur'an atau *Sunnah* Rasulullah atau bertentangan dengan ijma'

Syarat-syarat masalah mursalah hanya berlaku dalam muamalah, karena soal-soal ibadah tetap tidak berubah-ubah, tidak berlawanan dengan

masud syariat atau salah satu dalilnya yang sudah dikenal, masalah adalah karena kepentingan yang nyata dan diperlukan oleh masyarakat.¹⁰⁵



¹⁰⁵ A. Hanafie, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Widjaya, 1988), h. 144.

DAFTAR RUJUKAN

Buku

- Abbas, Ahmad Sudirman, *Qawa'id Fiqhiyah dalam Perspektif Fikih*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2004.
- Ahmad, Mahdi Rizqullah, *Biografi Rasulullah, Sebuah studi Analisis Berdasarkan Sumber-Sumber Autentik*, Jakarta: Qisthi Press, 2009.
- Al-Banna, Jamal, *Manifesto Fiqh 3 Memahami Paradigma Fiqh Moderat*, terjemahan oleh: Hisbullah Satraawi dan Zuhairi Miswari, Jakarta: Erlangga, 2006.
- Ali, Achmadi, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: Chandra Pratama, 1996.
- Ali, Zainudin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Al-Jaziri Abdurrahmman, *Fiqh Empat Madzhab Bagian Muamalah II*, Jakarta: Darul Ulum Press, 2001.
- Al-Zarqa, Mustafa Ahmad, *Al-Istislah Wa Al-Masai Ih Al-Mursalah Fi Syari'ah Al Islamiyah Wa Ushul Fiqh*, Jakarta: Riora Cipta, 2000.
- An-Nawawi, Imam Mahyidin, *ad-Dhurrah as-Salafiyyah Syarh al-Arba'in anNawawiyah*, Solo: Pustaka Arafah, 2006
- Az, Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media, 2006.
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2014.
- Badroen, Faisal, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Barkatullah, Abdul Halim Dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan Dan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Nusa Media, 2005.
- Celina, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Consuelo, G Sevilla dkk. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: UI Press, 1993.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2008.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2011.

- Djakfar, Muhammad, *Hukum Bisnis: Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah*, Yogyakarta: PT Lkis Printing Cemerlang, 2009.
- Djamil, Fathurrahman, *filasafat hukum islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999
- Djazuli, H.A, *Kaidah-Kaidah Fikih dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2006
- Djuaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Echols, John M dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Efendi, Satria Dan M Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Penanda Media, 2017.
- Faulidi, Asnawi Haris, *Transaksi Bisnis E-Commerce Persepektif Islam*, Jakaarta: Magistra Insania Press, 2004.
- Fuady, Munir, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001.
- Hanafie A, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Widjaya, 1988.
- Haris, Freddy, *Aspek Hukum Transaksi Secara Elektronik Di Pasar Modal*, Jakarta: Sinar Grafika Offest, 2010.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Imaniati, Sri Neni, *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam*, Bandung: Mandarmaju, 2002.
- Ja'far, Khumedi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandar Lamupung: Permatanet Publishing, 2016.
- Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syari'ah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008
- Karim, A Adiwarman, *Riba Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fiqh dan Ekonomi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Khairi, Iftahul, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab*, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014.
- Maghfirah, Ester Dwi, *Perlindungan Konsumen Dalam E-Commerce*, Jakarta: Grafikatama Jaya, 2009.
- Manan, Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2020.

- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Prenadamedia, 2012.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPFF, 2004.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perdata Indonesia, Cetakan Revisi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Musthofa, Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Bumi Akarsa, 2012.
- Nasution, Az, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media, 2001.
- Nurdin, Ridwan, *Fiqh Muamalah (Sejarah Hukum dan Perkembangannya)*, Banda Aceh: Pena, 2010.
- Nurohman Dede, *Memahami Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
- Peraturan Menti Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklananm Pembinaan Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).
- Qardhawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insan Press, 1997.
- Rahman, Abdul, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Rahman, Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Paragonatama Jaya, 2014.
- Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah, Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syari'ah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Salimah, Abdur Rasyid, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Shihab, Quraish, *Tafsir Al-Misbah Volume 3*, Jakarta: Lentera Hati, 2012.

- Sidabalok, Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji. *Penelitian Normatik, Suatu Penelitian Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Sudiarti, Sri, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Medan: Febi UIN-SU Press, 2018.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Susiadi, *Metodelogi Penelitian*, Bandar Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2016.
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- _____, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2007
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2014.
- Tim PrimaPena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gitamedia Press, 2015.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Utomo, Setiawan Budi, *Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen Edisi Revisi*, Jakarta: Prenada Media Group, 2013.

Jurnal

- Fahmi, Khalamillah, "Online Sale And Purcase Transaction (E-Commerce) In The Islamic Law Persepective", *Jurnal MPRA*, Vol. 8 No. 5, Juli 2019.
- Hismendi, *e-commerce: model interaksi jual beli*, *Jurnal Ekonomi Bisnis*, Vol. 15 No. 01, Februari 2016.
- Indrajit, Richardus Eko, "E-Commerce Kiat Dan Strategi Bisnis Di Dunia Maya", *Jurnal Interkom*, No. 047, Oktober 2012.
- Muhtarom, Muhammad, "Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak", *Jurnal Suhuf*, Vol. 26 No. 01, Mei 2014.
- Mustofa, Imam, "Transaksi Elektronik (E-Commerce) Dalam Persepektif Fikih", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 10 No. 2, Februari 2016.

Muthi, Wulandari Friska, Jual Beli *online* yang aman dan *syar'i*, *Jurnal Az-zarqa*, Vol. 7 No. 02, Desember, 2015.

Nur, Efa Rodiah, “Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern”, *Jurnal Al-‘Adalah*. Vol. XII No. 3, Juni 2015.

Rusfi, Muhammad, “Validasi Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum”, *Jurnal Al-‘Adalah*, Vol. 12 No. 01, Agustus 2014.

Safitri, Tiara Nur, “Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 03, No. 01, Maret 2017.

Salma, “Masalah Dalam Persepektif Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah*, Vol. 10 No. 2, Agustus 2012.

Santoso, Sugeng, “Jurnal Sistem Transaksi E-Comemrce Dalam Persepektif Kuhperdata dan Hukum Islam”, *Jurnal Ahkam*, Vol. 04, N0. 02, November 2016.

Sumber *on-line*

“PP 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, (On-Line), Tersediadi:<https://www.jogloabang.com/ekbis/pp-80-2019-perdagangan-sistem-elektronik>, (10 Oktober 2020).

Nurhalis, Perlindungan Konsumen dalam Persepektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Tersedia di: <http://smedia.neliti.commediapublications43513-ID>.

Kementrian Perdagangan, “Pemerintah Lahirkan PP Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik”. (On-Line), Tersedia di: <https://www.kemendag.go.id/en/newsroom/press-release/pp-nomor-80-tahun-2019-pemerintah-lahirkan-peraturan-pemerintah-tentang-perdagangan-melalui-sistem-elektronik>, (Februari 2020).